



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSTINUS SYAWAL
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 472592

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	778.200.000
1. Tanah Seluas 1.094 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 328.200.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7.616 m2/200 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	226.000.000
1. MOTOR, KAWASAKI NINJA 150 CC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, HONDA TRAIL CRF 150 L Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	158.994
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.041.358.994
III. HUTANG	Rp.	321.980.183
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	719.378.811

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.